

Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Masa Pandemi di Kabupaten Gresik

**Ratna Azis Prasetyo¹, Septi Ariadi², Bagong Suyanto³, Sudarso⁴, Abd Hannan⁵,
Risca Yunike Putri⁶**

^{1,2,3,4} Departemen Sosiologi, Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya, Jawa Timur, 65141, Indonesia

⁵Departemen Ilmu Sosial, Institut Agama Islam Negeri Madura
Jalan Panglegur Pamekasan, Jawa Timur, 65141, Indonesia

⁶ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jaln Dukuh KupangXXV/25 Surabaya, Jawa Timur, 65141, Indonesia

*Email: ratna.azis.prasetyo@fisip.unair.ac.id**

Abstrak

Pandemi COVID-19 membawa efek domino bagi peningkatan angka kemiskinan Indonesia. Di Kabupaten Gresik, besarnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terhentinya aktivitas industri dan usaha kecil membuat angka kemiskinan meningkat, sehingga jumlah Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi bertambah. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan tekanan kemiskinan yang dialami oleh PMKS selama pandemi COVID-19 serta strategi penanganan yang tepat terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada 400 PMKS di Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini mendapati temuan bahwa tekanan kemiskinan yang dilakukan oleh PMKS di masa pandemi COVID-19 adalah berkurangnya tabungan dan aset yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan hidup semasa pandemi. Selain itu, mereka juga kehilangan pekerjaan serta usaha yang ditekuni mengalami kemunduran, akibatnya para PMKS kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini turut berdampak pada tidak harmonisnya rumah tangga dan terancamnya keberlangsungan pendidikan anak mereka di sekolah. Strategi bertahan hidup yang paling mudah dilakukan oleh PMKS adalah melakukan perubahan pada pola konsumsi, sedangkan bantuan kerabat relatif sulit didapatkan serta kegiatan produktif seperti diversifikasi usaha juga relatif sulit dilakukan. Strategi penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan pemberdayaan PMKS terutama kelompok usia produktif. Selain bertujuan mencegah melemahnya kemampuan dan kesejahteraan, pemberdayaan usia produktif juga bertujuan memenuhi kebutuhan diri sendiri yang bersifat jangka panjang, yakni keluar dari tekanan kemiskinan yang dialami.

Kata kunci: COVID-19; PMKS; Tekanan Kemiskinan; Kemiskinan; Pemberdayaan

Poverty Pressure for People with Social Welfare Problems (PMKS) During the Pandemic in Gresik Regency

Abstract

The COVID-19 pandemic has brought a domino effect to increase poverty rates. In Gresik Regency, the number of layoffs (PHK) and small businesses that went out of business added new poor people so the number of PMKS increased. This study intends to describe the poverty pressure experienced by PMKS during the COVID-19 pandemic and the appropriate handling strategy. The research method used is descriptive research by conducting structured interviews to 400 PMKS in Gresik Regency. The results of this study found that the poverty pressure carried out by PMKS during the COVID-19 pandemic was a reduction in savings and assets owned to meet their daily needs during the pandemic where they lost their jobs and the businesses they were engaged in experienced setbacks, difficulties in meeting the needs of life and family nutrition, increased debt to domestic disputes and the threat of children dropping out of school. The easiest survival strategy for PMKS is to make changes to consumption patterns, while help from relatives is relatively difficult to obtain and productive activities such as business diversification are also relatively difficult to do. The coping strategy that can be done is to empower PMKS, especially the productive age group, which aims not only to prevent the fading of PMKS' ability to help themselves but in the long term they can get out of the pressures of poverty they are experiencing.

Keywords: COVID-19; PMKS; Poverty Pressure; Poverty; Empowerment

LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 tidak hanya membawa dampak *collapsnya* fasilitas kesehatan, namun juga terhambatnya pembangunan bahkan meningkatkan kemiskinan secara global. *World Bank* mencatat peningkatan jumlah rumah tangga miskin hingga 97 juta jiwa secara global. Di kawasan negara-negara Amerika Latin, tercatat penambahan hingga 10% dari keseluruhan jumlah rumah tangga miskin. Pandemi dan dampaknya bagi kemiskinan, khususnya rumah tangga dengan penghasilan harian memberikan dampak yang destruktif perekonomian rumah tangga. Pasalnya, selain permasalahan berkurangnya pemasukan karena banyaknya pekerja lepas yang dirumahkan, pembatasan social dan penerapan jam kerja baru membawa dampak pada jumlah serta kuantitas upah yang didapatkan pekerja (Kurniasih, 2020) .

Permasalahan kemiskinan dampak dari pandemic secara global juga dirasakan di Indonesia. Individu dan keluarga terdampak khususnya dari Kalanga ekonomi bawah masuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah salah satu masalah sosial yang dihadapi banyak daerah, tak terkecuali Kabupaten Gresik. Ketika pandemik COVID-19 makin meluas dan tak kunjung tertangani, imbas merebaknya wabah COVID-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga menimbulkan efek domino yang mengancam aktivitas produksi (van Barneveld et al., 2020), pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemiskinan yang makin meluas dan mendalam (Buheji et al., 2020), serta meningkatnya jumlah PMKS.

Sejak organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, kehidupan dan kelangsungan usaha harus diakui menjadi jauh lebih sulit. Jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK dilaporkan terus bertambah. Di berbagai daerah, sejumlah pabrik dilaporkan telah berhenti beroperasi, atau paling-tidak aktivitas produksinya turun drastis gara-gara tidak ada lagi permintaan pasar (Buheji et

al., 2020). Industri manufaktur yang selama ini menampung banyak pekerja justru kini banyak tersungkur. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia anjlok dari 45,3 pada Maret 2020 menjadi 27,5 pada April 2020. Ini berarti ancaman gelombang PHK dari sektor perekonomian firma sudah ada di depan mata. Diperkirakan, sekitar 15 juta pekerja menjadi korban imbas wabah COVID-19 yang terus merajalela (Indayani & Hartono, 2020).

Di berbagai daerah, ketika perusahaan berhenti beroperasi dan terpaksa merumahkan sebagian atau seluruh pekerjanya, maka aktivitas produksi otomatis berhenti, sehingga perusahaan kehilangan sumber pendapatannya yang bisa dipakai untuk mengaji pekerja dan menambah modal usaha. Memang, kalau upaya penanganan COVID-19 bisa selesai dalam kurun waktu 3 atau 4 minggu barangkali banyak perusahaan masih memiliki cadangan dana untuk melangsungkan usahanya. Tetapi, kalau aktivitas produksi terpaksa dihentikan hingga berbulan-bulan tanpa ada kepastian, telah berdampak pada industri bahkan pola konsumsi, krisis ekonomi serta pemulihan pascakrisis (Martin, Markhvida, Hallegatte, & Walsh, 2020) .

Hingga pertengahan bulan April 2020, menurut catatan jutaan orang telah dirumahkan. Lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mencatat sekitar 2-3,7 juta pekerja telah kehilangan mata pencahariannya. Hingga awal Mei 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 3 juta orang yang dirumahkan dan di-PHK. Rinciannya, pekerja sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.032.960 orang dan yang di-PHK sebanyak 375.165 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 314.833 orang. Total adalah 1.722.958 orang. Terlepas data mana yang valid dan *up to date*, di berbagai daerah, bisa dipastikan muncul orang-orang miskin baru dan orang-orang miskin yang mengalami pendalaman kemiskinan karena terimbas wabah COVID-19 (Setyadi & Indriyani, 2021; Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020). Orang-orang miskin baru inilah yang potensial menambah jumlah PMKS di berbagai daerah. Korban PHK yang pulang kampung, dan orang-orang yang usahanya kolaps, mereka tak pelak menjadi fakir-miskin, orang-orang yang kehidupannya susah karena tidak ada lagi tumpuan hidup.

Para pekerja pabrik, karyawan swasta dan para pelaku usaha lain, tidak sedikit yang turun status menjadi orang miskin baru gara-gara wabah COVID-19. Mereka bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi penyangga ekonomi keluarga –baik dalam bentuk tabungan, modal maupun asset produksi—umumnya tidak lagi dimiliki. Sebagai korban imbas COVID-19, mereka umumnya mengalami keterpurukan yang luar biasa akibat menurunnya daya beli masyarakat. Menurut data, inflasi April 2020 tercatat hanya 0,08 persen. Angka sekecil ini jelas mengindikasikan terjadinya penurunan drastis kemampuan daya beli masyarakat. Puluhan juta masyarakat yang terimbas dampak COVID-19 memang tidak lagi memiliki dana taktis yang bisa mereka gunakan untuk membeli berbagai barang di luar kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari.

Meskipun banyak dana telah dikucurkan, dan tidak sedikit program intervensi telah dicanangkan untuk menangani agar korban wabah COVID-19 tidak terus makin bertambah. Tetapi, perkembangan jumlah penduduk miskin yang makin parah, serta perkembangan jumlah PMKS di berbagai daerah sepertinya tidak berkurang atau minimal terhentikan, bahkan dalam beberapa hal makin meluas. Bagi sebuah wilayah seperti Kabupaten Gresik yang tengah beranjak menjadi metropolitan, dampak yang ditimbulkan akibat krisis bukan saja melahirkan gelombang orang-orang miskin baru dan

meningkatnya angka pengangguran akibat terkena PHK atau usahanya *collaps*, tetapi juga menyebabkan perkembangan persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat PMKS) menjadi makin mencemaskan (Alrahman, n.d.).

Di Kabupaten Gresik, jumlah PMKS ada indikasi kembali meningkat. Di berbagai sudut jalan, jumlah dan kantong-kantong anak jalanan kembali terlihat, rumah-rumah kumuh tetap eksis, pengemis, gelandangan, WTS, wanita rawan sosial dan kelompok PMKS yang lain seolah tak pernah berkurang, bahkan ada indikasi kembali naik karena imbas merebaknya wabah COVID-19. Di sisi lain, jumlah PMKS kembali bertambah tampaknya juga berkaitan dengan terjadinya proses marginalisasi dan polarisasi antarwilayah yang makin lebar. Ketika sebuah keluarga mengalami kesulitan ekonomi, tidak jarang terjadi mereka kemudian sengaja atau tidak sengaja terpaksa menelantarkan anaknya: hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak putus di tengah jalan karena keterbatasan ekonomi dan tekanan kemiskinan (Handayani, Ma'ruf, & Ambarawati, n.d.).

Siapa bisa menjamin PMKS dapat tertangani dengan baik, jika bencana COVID-19 tak kunjung terhentikan, dan arus urbanisasi berlebih (*over urbanization*) tetap tinggi, sementara alokasi dana untuk penanganan PMKS tetap jalan di tempat dan tidak sebanding dengan besaran masalah yang dihadapi? Keberadaan fakir miskin, misalnya, walaupun telah digulirkan berbagai program intervensi, tetapi alih-alih berkurang, dalam kenyataan jumlah fakir miskin di berbagai daerah justru terasa makin meningkat. Hal yang sama juga berlaku pada jumlah penduduk miskin, anak jalanan, anak terlantar, pengemis, gelandangan, dan sebagainya di Kabupaten Gresik (Nafirin & Hudaidah, 2021).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tekanan kemiskinan yang dialami oleh para PMKS di Kabupaten Gresik. Tujuannya agar dapat memberikan solusi dari akar permasalahan yang dihadapi oleh PMKS serta kedepan nasib PMKS tidak semakin terpuruk akibat pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya bermaksud memberikan program solusi yang perlu dikembangkan dalam rangka untuk mengeliminasi dan menangani masalah sosial, khususnya PMKS di Kabupaten Gresik. Dalam lima tahun terakhir, disadari bahwa perkembangan PMKS masih meresahkan, dan membutuhkan penanganan segera. Untuk mencegah agar tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan, dan sekaligus membantu PMKS agar tidak selamanya terperangkap pada penderitaan dan tekanan kemiskinan, maka ke depan mendesak dirumuskan program pembangunan bidang sosial yang benar-benar efektif.

Untuk memperoleh masukan dan data yang akurat agar program yang dirumuskan benar-benar kontekstual, dalam penelitian digunakan metode deskriptif di mana proses pengumpulan data dilakukan melalui empat cara, yakni:

Pertama, mengkaji dan menganalisis data sekunder mengenai perkembangan PMKS di Kabupaten Gresik. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari Bappeda, Dinas Sosial, BPS, survei-survei lokal, dan data dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Uraian tentang persebaran dan perkembangan PMKS ini penting untuk mengetahui peta makro permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik.

Kedua, melakukan *review* terhadap hasil-hasil studi mengenai kebijakan pembangunan bidang sosial dan persoalan PMKS yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Review* terhadap hasil penelitian ini penting dilakukan, selain untuk memperoleh ancangan teoritis dan bahan perbandingan, juga sekaligus sebagai dasar untuk penyusunan kerangka analisis permasalahan PMKS yang termasuk prioritas untuk ditangani di Kabupaten Gresik.

Ketiga, melakukan penggalan data primer ke sejumlah kecamatan untuk memperoleh gambaran yang valid dan akurat mengenai kondisi PMKS di Kabupaten Gresik pascapandemik COVID-19. Penggalan data primer yang dilakukan di sini lebih menekankan aspek kualitatif atau kedalaman data, karena disadari bahwa upaya penanganan permasalahan PMKS akan lebih efektif jika akar persoalan yang ada dicoba dipahami secara lebih empatif lewat pendekatan yang sifatnya partisipatif. Dalam studi ini, wawancara dilakukan kepada 400 PMKS di 8 wilayah kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian meliputi Driyorejo, Menganti, Gresik, Kebomas, Cerme, Manyar, Bungah dan Duduksampeyan.

Keempat, melakukan kajian tentang mekanisme kerja dan kendala yang dihadapi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam proses pelaksanaan program penanganan PMKS. Termasuk di sini, melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan aparat Pemerintah Kabupaten Gresik, dinas terkait, *stakeholder*, dan para pakar untuk kepentingan konfirmasi dan identifikasi prioritas permasalahan PMKS yang dihadapi— untuk kemudian dijadikan bahan acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan PMKS di Kabupaten Gresik yang efektif.

Tabel 1. Lokasi Penelitian dan Jumlah Responden

| Kecamatan | Kelurahan | Jumlah |
|---------------|--|--------|
| Driyorejo | Bambe, Mulung , Tenaru | 50 |
| Menganti | Bringkang, Domas, Hulaan, Kepatihan, Krajan, Laban | 50 |
| Gresik | Kroma, Lumpur, Pakelingan | 50 |
| Kebomas | Giri, Kebomas, Kembangan | 50 |
| Cerme | Cagak Agung, Cerme Kidul, Cerme Lor, Iker-iker Geger, Ngabetan, Pandu, Roomo | 50 |
| Manyar | Banyutami, Manyar, Peganden | 50 |
| Bungah | Bedanten, Bungah, Sukorejo | 50 |
| Duduksampeyan | Duduksampeyan, Kramat, Petisbenem | 50 |
| Total | | 400 |

Dalam laporan penelitian, bagian terpenting yang dicoba ditampilkan adalah inventarisasi isu prioritas, program intervensi serta tujuan apa yang hendak dicapai dari program intervensi yang telah dirumuskan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program penanganan PMKS di Kabupaten Gresik dan program peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sosial PMKS di Kabupaten Gresik

Di Kabupaten Gresik, persebaran PMKS relatif merata di berbagai wilayah. Paling-tidak di delapan kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, bisa dengan mudah ditemui PMKS dari berbagai kategori. PMKS yang berkaitan dengan persoalan keterbatasan ekonomi disinyalir paling banyak dan mudah ditemui di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik.

Selama pandemi COVID-19, jumlah dan persebaran PMKS di Kabupaten Gresik ditengarai kembali meningkat. Dalam kondisi normal saja, perkembangan PMKS seringkali sulit ditangani. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika situasi krisis akibat pandemi COVID-19 tak kunjung selesai? Di berbagai wilayah, jumlah dan persebaran PMKS ditengarai bertambah karena kondisi ekonomi nasional maupun regional sedang bermasalah. Akibat kondisi perekonomian yang tengah lesu, perkembangan PMKS umumnya meningkat tak terkendal (Sakti, Sulistyaningsih, & Sulistyowati, 2021).

Di antara berbagai kategori PMKS, selama pandemi COVID-19, ditengarai yang paling banyak pertambahannya adalah PMKS karena sebab-sebab penurunnya kondisi sosial-ekonomi. Seperti ditemukan dalam survei yang dilakukan, kategori PMKS yang diwawancarai dalam penelitian ini, sebagian besar (52,8%) adalah fakir miskin. Sebanyak 24,8% merupakan anak jalanan, dan 10,5% kategori pengemis. Sebanyak 5,8% gelandangan, dan 2% gelandangan psikotik. Sebanyak 4,2% merupakan kelompok tuna susila. Dibandingkan PMKS lain, fakir miskin tampak lebih menonjol karena tekanan kebutuhan hidup yang makin sulit dipenuhi akibat imbas pandemi COVID-19.

PMKS yang ada di Kabupaten Gresik, umumnya adalah orang-orang lama yang memang mengalami berbagai masalah. Hampir separuh responden mengaku sudah lama menjadi PMKS, yakni di atas 5 tahun (42,2%). Sebanyak 20% sekitar 1-3 tahun, dan 21,5% sekitar 3,1 hingga 5 tahun. Dari 400 PMKS yang diteliti, sebanyak 16,2% merupakan PMKS baru, yakni di bawah 1 tahun. Bisa diduga bahwa PMKS baru ini muncul karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

Jenis kelamin responden, sebagian besar laki-laki (65,2%) dan sebanyak 32,8% berjenis kelamin perempuan. Meski proporsi ini tidak otomatis mencerminkan proporsi jenis kelamin PMKS di Kabupaten Gresik, tetapi ada indikasi bahwa PMKS yang berjenis kelamin laki-laki memang lebih banyak ditemui.

Usia PMKS yang diwawancarai berkisar antara 13 tahun hingga 67 tahun. Sebagian besar responden (39,5%) berusia 32-47 tahun. Sebanyak 26,5% berusia 48-63 tahun. Dari 400 PMKS yang diteliti, sebanyak 10,5% masih berusia di bawah 15 tahun. Mereka umumnya adalah anak jalanan. Ada 6,2% responden yang berusia di atas 64 tahun. Sebagian PMKS yang sudah berusia lansia, mereka umumnya adalah orang tua yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan dan banyak menggantungkan kehidupannya dari bantuan keluarga atau pemerintah.

Idealnya dengan bekal pendidikan yang cukup, para PMKS diharapkan dapat bertahan hidup dan bahkan mengembangkan karir dalam pekerjaannya. Tetapi, karena berbagai faktor, tidak semua responden yang menempuh pendidikan paralel dengan prestasi kehidupannya. Sebanyak 14,8% responden berpendidikan SMA. Tetapi sebagian responden berpendidikan hanya SD (43%), dan bahkan 7,5% responden mengaku tidak pernah menempuh pendidikan formal. Sebanyak 34,8% berpendidikan

SMP. Terlepas dari latar belakang pendidikannya, karena faktor yang sifatnya struktural banyak responden mengaku tidak bisa mengembangkan potensinya, sehingga menjadi bagian dari fakir miskin.

Tabel 2. Profil Responden

| Profil | Kategori | Persentase |
|--|----------------------|-------------------|
| Kategori PMKS | Fakir Miskin | 52,8 % |
| | Anak Jalanan | 24,8% |
| | Tuna Susila | 4,2% |
| | Pengemis | 10,5% |
| | Gelandangan | 5,8% |
| | Gelandangan Psikotik | 2% |
| Lama menjadi PMKS | <1 Tahun | 16,2% |
| | 1 Tahun - 3 Tahun | 20% |
| | >3 Tahun - 5 Tahun | 21,5% |
| | >5 Tahun | 42,2% |
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 65,2% |
| | Perempuan | 32,8% |
| Umur Responden | 0-15 Tahun | 10,5% |
| | 16-31 Tahun | 17,2% |
| | 32-47 Tahun | 39,5% |
| | 48-63 Tahun | 26,5% |
| | >64 Tahun | 6,2% |
| Pendidikan Terakhir Responden | Tidak Sekolah | 7.5% |
| | SD | 43% |
| | SLTP | 34.8% |
| | SLTA | 14.8% |
| Jumlah anak responden | Tidak Memiliki Anak | 28.2% |
| | 1 Anak | 18.2% |
| | 2 Anak | 27.2% |
| | 3 Anak | 17% |
| | 4 Anak | 5.2% |
| | 5 Anak | 4% |
| Penghasilan keluarga responden per bulan | < 700 Ribu | 35.5% |
| | 800 Ribu-1,5 juta | 33% |
| | 1,6 Juta-2,3 Juta | 8% |
| | 2,4 Juta-3,1 Juta | 21.2% |
| | >3,2 Juta | 2.2% |

Sumber: Hasil Penelitian

Sebagian besar PMKS yang diteliti kebanyakan sudah menikah dan memiliki anak (lihat tabel 2). Dari 400 responden yang diwawancarai, hanya 28,2% yang mengaku belum memiliki anak dan belum menikah. Sebanyak 27,2% responden mengaku memiliki 2 orang anak, dan sebanyak 18,2% responden mengaku memiliki satu orang anak. Dari 400 responden yang ada, sebanyak 17% responden mengaku memiliki 3 orang anak, 5,2% memiliki 4 orang anak, dan 4% memiliki 5 orang anak. Dalam kondisi perekonomian masih sedang tidak bermasalah, mungkin tidak masalah

bagi responden memiliki anak lebih dari 2 orang. Tetapi, lain soal ketika kondisi perekonomian sedang lesu seperti sekarang ini. Tidak sedikit responden mengeluh kehidupannya bermasalah dan sulit memenuhi kebutuhan anak yang terlalu banyak.

Dari segi penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, studi ini menemukan sebagian besar keluarga PMKS hidup dengan penghasilan yang sangat kecil, yakni di bawah 700 ribu per bulan. Sebanyak 35,5% responden mengaku hanya hidup dengan penghasilan di bawah 700 ribu setiap bulannya. Dengan dua anak, misalnya, penghasilan yang hanya 700 ribu tentu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sebanyak 33% responden mengaku memiliki penghasilan sekitar 800 ribu hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan penghasilan seperti ini, jelas mereka adalah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 400 PMKS yang diteliti, yang mengaku berpenghasilan di atas 3,2 juta per bulan ditemukan sebanyak 2,2%.

Tekanan Kemiskinan dan Strategi Bertahan Hidup

Pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam keselamatan jiwa masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang mendalam di berbagai kalangan masyarakat, terutama kelompok PMKS. Banyak kajian membuktikan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan cukup banyak masyarakat yang tertular karena tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Di samping itu, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan tak kunjung terselesaikan hingga satu tahun lebih menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang terkena imbasnya.

Studi yang dilakukan menemukan, salah satu dampak yang dialami PMKS dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah berkurangnya tabungan keluarga. Bisa dibayangkan ketika kondisi perekonomian tengah lesu karena imbas COVID-19, maka usaha yang ditekuni masyarakat pun tidak sedikit yang terancam kolaps. Dari 400 responden, sebanyak 32,2% responden mengaku sangat terasa tabungan mereka berkurang. Sebanyak 35% menyatakan terasa, dan sisanya menyatakan tabungan mereka relatif tidak terasa berkurang.

Akibat tekanan kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19, dampak yang paling dirasakan PMKS yang diteliti sebagian besar adalah berkaitan dengan dampak ekonomi keluarga. Selain tabungan yang berkurang, dampak yang kerap kali dirasakan keluarga PMKS adalah usaha yang ditekuni mengalami kemunduran (29,5%), kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari keluarga (31,2%), kehilangan pekerjaan (23%), terganggu status gizi keluarga (23,2%) dan utang yang meningkat (23%). Ketika sumber-sumber pemasukan tidak ada lagi, karena usahanya mengalami kemunduran, maka yang terjadi akhirnya adalah kondisi hidup yang serba kekurangan. Studi ini menemukan cukup banyak responden yang sehari-hari hidup serba kekurangan dan menderita berbagai tekanan akibat pandemi COVID-19.

Bagi masyarakat yang terkategori sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi situasi pandemik sesungguhnya bukanlah persoalan yang mudah. Kendati persoalan merebaknya pandemi virus COVID-19 bukan merupakan penyebab tunggal seseorang terjerembab menjadi PMKS tetapi diakui atau tidak bahwa pandemi telah memberikan efek domino yang dirasakan PMKS sehingga memaksa mereka untuk mengembangkan mekanisme tertentu agar dapat tetap survive. Sebagaimana telah dilansir dalam berbagai media bahwa merebaknya pandemik COVID-19 ke berbagai daerah telah menyebabkan banyak usaha kolaps, banyak pelaku usaha skala mikro dan

kecil mengalami penurunan omzet secara drastis, tidak sedikit karyawan terpaksa kehilangan pekerjaan karena menjadi korban PHK dan meluasnya tekanan kemiskinan yang dirasakan masyarakat terutama pada strata bawah.

Tabel 3. Akibat Tekanan Kemiskinan yang Dialami Responden Selama Pandemi

| Akibat Kemiskina | Tekanan | Tingkat dampak tekanan | | | |
|--|---------|------------------------|--------|--------------|---------------------|
| | | Sangat Terasa | Terasa | Tidak Terasa | Sangat Tidak Terasa |
| Tabungan Berkurang | | 32.2% | 35% | 5.8% | 27% |
| Aset Produksi Dijual | | 13% | 43% | 20.2% | 23.8% |
| Kehilangan Pekerjaan | | 23% | 20.2% | 38.5% | 18.2% |
| Usaha yang ditekuni mengalami kemunduran | | 29.5% | 45% | 9.8% | 15.8% |
| Kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari | | 31.2% | 42.2% | 11.5% | 15% |
| Terganggunya status gizi keluarga | | 23.2% | 42.2% | 29% | 5.5% |
| Hutang meningkat | | 23% | 39.5% | 19% | 18.5% |
| Perselisihan rumah tangga | | 9.5% | 15.2% | 47.8% | 27.5% |
| Anak putus sekolah/kuliah | | 6.2% | 11% | 53.5% | 29.2% |

Sumber : Hasil Penelitian

Situasi krisis akibat wabah COVID-19 yang tak kunjung usai, bukan saja menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor kegiatan ekonomi, kemerosotan pertumbuhan ekonomi dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi secara akumulatif juga menyebabkan meningkatnya jumlah orang-orang miskin baru dan orang-orang yang dekat dengan kemiskinan (*near poor*). Sehingga penambahan jumlah PMKS sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari makin meluasnya dampak COVID-19. Di berbagai daerah di Kabupaten Gresik, penyandang masalah kesejahteraan sosial juga menghadapi kondisi yang relatif sama sehingga harus menyasiasinya melalui berbagai cara agar mereka tetap dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Realitas sosial yang ada menunjukkan bahwa kondisi pandemik yang berlangsung selama ini telah menyebabkan jumlah keluarga pra-sejahtera cenderung meningkat, sementara di saat yang sama kesempatan kerja yang tersedia relatif tidak bertambah atau bahkan berkurang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dan angka pengangguran. Selanjutnya bagaimana kiat atau strategi yang dikembangkan oleh para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi tekanan kebutuhan yang dihadapi selama ini?

Berdasarkan kegiatan lapangan yang dilakukan di berbagai daerah di Kabupaten Gresik dengan mewawancarai berbagai jenis PMKS yang ada yakni fakir miskin, anak

jalanan, tuna susila, gelandangan dan pengemis serta gelandangan psikotik ternyata mereka memiliki berbagai bentuk strategi dalam menyalakan kebutuhan yang dihadapi seperti; mengembangkan perilaku subsistensi, melakukan diversifikasi usaha, menambah jam kerja, mendayagunakan tenaga kerja dalam keluarga dan sebagainya. Meskipun dalam kenyataan tekanan kebutuhan yang dihadapi PMKS terjadi secara terus menerus namun tidak sedikit yang tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup bahkan keluar dari situasi krisis yang membelenggunya dengan selamat. Dalam hal ini, PMKS banyak yang mengembangkan ragam strategi atau mekanisme untuk kelangsungan hidup/ survival sesuai dengan habituasi yang dijalankan. Dalam kehidupan sehari-hari, PMKS seperti keluarga fakir miskin misalnya umumnya akan memperkecil atau memperluas lingkaran anggota keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhannya dan menyesuaikan diri dengan situasi sosial-ekonomi yang berubah (Ridwan, n.d.) .

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Andari , berhasil mengidentifikasi pola dan mekanisme *survival* yang biasa dikembangkan keluarga miskin untuk bertahan hidup. Pada tahap awal, sasaran yang dituju oleh rumah tangga berpendapatan sangat rendah adalah menghasilkan atau memperoleh makan cukup. Di berbagai wilayah pedesaan, sudah bukan rahasia lagi bahwa akses pada lahan untuk produksi yang subsisten sedikit-banyak akan melindungi rumah tangga miskin itu dari biaya pangan yang meningkat, dengan menyediakan suatu bentuk jaminan pangan yang penting. Apakah strategi tersebut juga dikembangkan oleh PMKS yang tersebar di berbagai daerah di kabupaten Gresik? (Islamiyah, 2020).

Berdasarkan hasil kegiatan lapangan yang dilakukan, ditemukan bahwa perilaku subsistensi ternyata umumnya mudah dikembangkan oleh PMKS. Masih dimungkinkannya melakukan upaya subsistensi karena sumber daya alam yang tersedia masih mendukung untuk aktivitas tersebut. Menurut catatan yang ada dari 400 responden yang ditemui, sebagian besar responden (23,5%) menyatakan perilaku subsistensi sangat mudah dilakukan, dan sebanyak 51,2% responden menyatakan relatif mudah dilakukan. Hanya sebanyak 16,2% responden yang menyatakan sulit mengembangkan perilaku subsistensi saat menghadapi tekanan kebutuhan hidup.

Selanjutnya dari kegiatan lapangan yang dilakukan juga ditemukan, kiat yang relatif mudah dilakukan untuk menyalakan kebutuhan hidup adalah dengan melakukan pengetatan konsumsi. Dari 400 responden sebanyak 59,2% menyatakan cara ini relatif mudah dilakukan dan sebanyak 18,2% mengaku sangat mudah untuk melakukannya. Bentuk pengetatan konsumsi di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyederhanakan kegiatan konsumsi sehari-hari atau dalam bentuk mengurangi frekuensi makan, khususnya bagi orang tua yang sudah terbiasa menahan lapar. Sudah menjadi cara paling umum, apabila kondisi keuangan memang tidak memungkinkan, maka cara yang paling mudah dilakukan keluarga-keluarga fakir miskin adalah makan seadanya. Tidak sedikit pula keluarga fakir miskin yang mengaku kalau terpaksa mereka akan menurunkan kualitas menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari pada saat menghadapi kondisi krisis karena pandemi COVID-19 (Fadhli, Himmah, & Taqiyuddin, 2021).

Di samping dengan melakukan pengetatan konsumsi dan perilaku subsistensi ketika menghadapi tekanan kebutuhan PMKS juga mengembangkan strategi lain yakni dengan menambah jam kerja. Strategi ini dikembangkan keluarga PMKS agar mereka

tidak tergilas krisis dan tekanan kebutuhan terutama di masa pandemik dengan cara bekerja lebih keras yakni menambah jam kerja sehari-hari. Bagi responden langkah ini relatif mudah dilakukan (60,5%) dan sebanyak 4,5% responden mengaku sangat mudah untuk dilakukan. Dengan memperpanjang waktu bekerja mereka yang bekerja sebagai buruh misalnya akan dapat memperoleh penghasilan tambahan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tekanan kebutuhan hidup.

Tabel 4. Penyiasatan Tekanan Kebutuhan Akibat COVID-19

| Penyiasatan Kebutuhan COVID-19 | Tekanan Akibat | Tingkat dampak tekanan | | | |
|---|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| | | Sangat Sulit Dilakukan | Sulit Dilakukan | Relatif Mudah Dilakukan | Sangat Mudah Dilakukan |
| Perilaku Subsistensi | | 9% | 16,2% | 51,2% | 23,5% |
| Diversifikasi usaha | | 17,8% | 69,2% | 13% | 0,2% |
| Penambahan jam kerja | | 11,2% | 23,8% | 60,5% | 4,5% |
| Pengetatan konsumsi/mengencangkan ikat pinggang | | 7,5% | 15% | 59,2% | 18,2% |
| Pendayagunaan tenaga kerja keluarga | tenaga | 20,2% | 55,5% | 22,5% | 1,8% |
| Meminta bantuan kerabat | | 16,5% | 53,8% | 26,8% | 3% |

Sumber: Hasil Penelitian

Selanjutnya dari hasil kegiatan lapangan yang dilakukan ditemukan relatif sedikit penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengembangkan strategi dengan mendayagunakan tenaga kerja keluarga atau anggota keluarga untuk mengatasi tekanan kebutuhan hidup. Sebanyak 55,5% responden mengaku kesulitan untuk meminta anggota keluarga untuk terlibat dalam dunia kerja untuk menambah penghasilan. Bahkan sebanyak 20,2% responden langkah tersebut sangat sulit untuk dikembangkan.

Strategi lain yang dirasakan sulit dilakukan responden adalah melakukan diversifikasi usaha. Langkah untuk mengembangkan usaha di sektor lain atau sektor alternatif yang juga kreap dikatakan melakukan diversifikasi usaha, tidaklah mudah dilakukan responden dengan berbagai alasan. Sebanyak 69,2% responden mengaku sulit melakukan diversifikasi usaha, dan bahkan 17,8% responden menyatakan sangat sulit untuk melakukannya akibat berbagai keterbatasan yang dihadapinya. Selain keterbatasan dalam hal pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan atau keahlian yang dimiliki, menurut responden tanpa didukung oleh aset atau modal yang cukup, nampaknya mustahil bagi mereka untuk dapat melakukan pengembangan usaha alternatif atau melakukan diversifikasi usaha.

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa upaya diversifikasi usaha sulit dilakukan akibat berbagai keterbatasan yang dimiliki responden baik menyangkut soal pengetahuan, ketrampilan/keahlian, modal usaha, koneksi atau jaringan sosial dan sebagainya. Dalam aktivitas usaha bagaimanapun juga kepemilikan koneksi atau pihak-pihak tertentu yang bisa diposisikan sebagai patron yang dapat dijadikan tempat bersandar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan berbagai bentuk modal baik modal

ekonomi, sosial maupun kultural. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, pada akhirnya memang tidak banyak pilihan yang tersedia bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menyalakan dan keluar dari tekanan kebutuhan hidup yang mereka alami. Bagi keluarga fakir miskin, mencari sumber-sumber penghasilan alternatif, bagaimana pun bukanlah hal yang mudah, sehingga ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan hidup yang tidak lagi bisa ditunda, maka yang seringkali dilakukan pada akhirnya adalah dengan menggadaikan barang, menjual, berhutang (Ainiyah, 2020) atau meminta bantuan kerabatnya.

Bagi PMKS yang masih memiliki kohesi sosial yang kuat dengan kelompok dan kerabatnya, salah satu potensi sosial yang dapat diandalkan sebenarnya adalah jaringan kerabat agar tetap *survive*. Dukungan kerabat sangat penting bagi kelangsungan hidup PMKS terutama saat menghadapi tekanan kebutuhan. Namun sayang dari sebanyak 400 responden yang diwawancarai sejumlah 53,8% mengaku meminta bantuan kerabat merupakan langkah yang sulit dilakukan bahkan sangat sulit dilakukan (16,5%). Fakta ini tentu tidak cukup menggembirakan bagi kelangsungan hidup PMKS sebab secara sosiologis keberadaan dan peran kerabat bagaimana pun adalah semacam asuransi sosial yang sifatnya sangat fungsional untuk tempat melakukan *sambatan* sebagai ciri khas pada masyarakat desa. Di daerah pedesaan biasanya keluarga-keluarga tinggal dengan pola somah (*extended family*) di mana hubungan personal antar anggota kerabat masih sangat erat satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini maka masyarakat desa sangat lazim meminta bantuan kerabat jika sedang menghadapi masalah atau tekanan kebutuhan.

Lingkungan sosial yang kondusif dan bentuk hubungan yang bersifat personal, dalam banyak hal harus diakui memiliki fungsi yang positif. Kondisi ini berbeda dengan pola hubungan masyarakat kota yang cenderung bersifat kontraktual dan impersonal, di daerah pedesaan antara keluarga satu dengan yang lain umumnya saling kenal dengan baik, dan ada semacam rasa kebersamaan dan kohesi sosial yang masih kuat, sehingga meski pun tekanan situasi krisis menghantam bertubi-tubi, namun dengan penghematan, kreativitas dan dukungan pranata-pranata sosial di sekitarnya, mereka relatif masih mampu bertahan hidup.

Strategi Masyarakat Miskin PMKS dalam Perspektif Sosologi

Snel dan Staring (E Suharno, 2003) memberi penjelasan cukup mendalam terkait definisi bertahan hidup. Menurutnya, strategi bertahan hidup merupakan serangkaian tindakan dan perilaku sosial yang dimunculkan oleh individu atau kelompok masyarakat kelas sosial tertentu untuk dapat menjaga daya tahan kebutuhan hidupnya. Strategi hidup dilakukan oleh aktor melalui banyak cara, namun umumnya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, atau dapat juga dilakukan dengan menekan pengeluaran biaya hidup, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam ilmu sosial, strategi hidup sering kali diidentifikasi sebagai strategi menjaga kebutuhan ekonomi, yang selama ini dinilai sebagai kebutuhan paling mendasar keberlangsungan hidup masyarakat secara umum, baik di kalangan pedesaan maupun perkotaan.

Menurut Mosser (E Suharno, 2003) strategi bertahan hidup mempunyai kerangka khusus, dirinya tidak bisa dilakukan secara sekaligus atau tanpa perencanaan yang matang. Strategi hidup meniscayakan pada penyesuaian dan pengembangan aset.

Aset di sini meliputi; 1). Aset tenaga kerja, 2). Aset modal manusia, 3). Aset produktif, 4). Aset relasi rumah tangga atau keluarga, 5). Aset modal sosial. Kelima aset ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka atau konsep bertahan hidup. Namun, umumnya dari kelima aset ini, lazimnya masyarakat lebih banyak menggunakan aset modal sosial dan aset produktif sebagai instrumen paling mudah dilakukan dan ditemukan, khususnya bagi kalangan masyarakat yang secara ekonomi ada di level menengah ke bawah. Sebaliknya bagi masyarakat dengan ekonomi atas, strategi bertahan hidup melalui dua instrumen sangat sulit dilakukan (E Suharno, 2003). Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana strategi hidup itu dapat dilakukan, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada masa Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik?

Terkait pertanyaan di atas, Edi Suharno menyatakan bahwasanya langkah atau tindakan strategi bertahan hidup di kalangan masyarakat dalam upaya menangani dan menghadapi problem atau permasalahan ekonomi, secara umum itu dapat dilakukan melalui tiga (3) strateg (E Suharno, 2003). *Pertama*, strategi aktif, yaitu langkah cermat dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam lingkaran atau lingkungan keluarga, baik potensi alam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperkuat semangat etos kerja di kalangan internal keluarga, memanfaatkan sumber-sumber produktif di sektor pertanian yang ada di lingkungan. Kaitannya dengan kajian ini, berdasarkan temuan data lapangan diperoleh fakta bahwa dari total 400 responden, sebanyak 52,2 persen mengatakan jika strategi bertagan hidup melalui instrumen dirasa lebih mudah dilakukan, dan sebanyak 23,5 persen merasa sangat sulit dilakukan.

Kedua, strategi pasif, yaitu strategi bertahan hidup dengan cara menekan pengeluaran dan pembiayaan hidup, sehingga dapat mengurangi biaya dan tanggungan hidup di level keluarga. Mengencangkan ikat pinggang begitu istilahnya menjadi kelaziman yang dilakukan selama pandemi. Sebagai contoh yang dilakukan yaitu menekan pembiayaan gaya hidup yang mencakup makanan dan sejenisnya. Pada kasus penyebaran COVID-19 di kabupaten Gersik, berdasarkan hasil penelusuran data lapangan di diperoleh fakta bahwa sebanyak 59 persen masyarakat miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merasa lebih mudat bertahan hidup dengan cara menekan dan memperkecil biaya kebutuhan hidup di keluarga, dan sebanyak 18 persen merasa sangat mudah dilakukan. *Ketiga*, strategi pemanfaatan jejaring sosial dan pemanfaatan organisasi filantropi yang berorientasi pada penguatan sosial di level masyarakat, khususnya di level akar rumput. Hanya saja terkait kajian ini, berdasarkan temuan data lapangan, strategi ini kurang begitu mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat masyarakat miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabuparen Geresik. Ada banyak faktor mengapa instrumen ini kurang banyak dilakukan, salah satunya adalah faktor efek domino dari COVID-19 yang membuat kelesuan ekonomi di level masyarakat secara menyeluruh. Krisis multiaspek di level masyarakat secara menyeluruh membuat strategi ini sulit dilakukan.

KESIMPULAN

Pada situasi normal, PMKS berada pada kondisi yang kurang beruntung dalam kehidupan. Adanya pandemi COVID-19 semakin memperparah kondisi tersebut serta telah berdampak pada peningkatan jumlah PMKS. Para PMKS ini selama pandemi COVID-19 mengalami tekanan kemiskinan yang berakibat pada berkurangnya tabungan, aset produksi, hilangnya pekerjaan serta usaha mengalami kemunduran yang signifikan. Selanjutnya tekanan kemiskinan juga berdampak pada kehidupan sehari-hari seperti kesulitan pemenuhan kebutuhan makan dan gizi, peningkatan hutang hingga perselisihan dalam rumah tangga dan anak yang terancam putus sekolah.

Terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh PMKS membuat mereka kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan. Usaha yang mengalami kemunduran sangat sulit untuk dikembangkan di tengah pandemi COVID-19. Sementara kerabat yang biasanya berfungsi sebagai penyelamat di saat situasi krisis sangat sulit untuk diandalkan. Sempitnya peluang untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan juga membuat pendayagunaan tenaga kerja keluarga menjadi sulit. Yang bisa dilakukan oleh PMKS untuk menghadapi pandemi COVID-19 hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar seperti melakukan perilaku subsistensi, berhemat serta berupaya mendayagunakan waktu luang mereka untuk bekerja.

Untuk itu Upaya penanganan PMKS yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan adanya program yang bertujuan untuk memberdayakan kemandirian PMKS terutama yang masih berusia produktif seperti korban PHK, pedagang, sektor industri kecil, kaum perempuan miskin, sektor informal, buruh, PKL dan sebagainya. Program ini sangat penting dilakukan agar penanganan PMKS tidak terjebak pada upaya-upaya penyelamatan yang sifatnya darurat-penyelamatan saja yang pada akhirnya hanya akan mengancam kelangsungan hidup PMKS ke depan karena dapat mematikan mekanisme menolong diri sendiri sebagaimana mekanisme survival yang telah dikembangkan oleh PMKS. Program pemberdayaan memang lebih sulit dilakukan dan hasilnya akan terlihat dalam jangka panjang, namun pemberdayaan dapat mengeluarkan keluarga PMKS dari belenggu kesulitan hidup yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahim, S. (N.D.). Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. 17.
- Buheji, M., Da Costa Cunha, K., Beka, G., Mavrić, B., Leandro Do Carmo De Souza, Y., Souza Da Costa Silva, S., ... Chetia Yein, T. (2020). The Extent Of Covid-19 Pandemic Socio-Economic Impact On Global Poverty. A Global Integrative Multidisciplinary Review. *American Journal Of Economics*, 10(4), 213–224. <https://doi.org/10.5923/J.Economics.20201004.02>
- E Suharno. (2003). *Coping Strategies Dan Keperfungsian Sosial*. Aloysius Gunata Brata.
- Fadhli, K., Himmah, S. R., & Taqiyuddin, A. (2021). Analisis Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19. *Education And Development*, 9(3), 110–117.
- Handayani, N., Ma'ruf, M., & Ambarawati, G. A. (N.D.). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. 4(1), 12.

- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Infoematika*, 18(2), 201–208.
- Islamiyah, J. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. 13.
- Martin, A., Markhvida, M., Hallegatte, S., & Walsh, B. (2020). Socio-Economic Impacts Of Covid-19 On Household Consumption And Poverty. *Economics Of Disasters And Climate Change*, 4(3), 453–479. <https://doi.org/10.1007/S41885-020-00070-3>
- Nafrin, I. A., & Hudaidah, H. (2021). Perkembangan Pendidikan Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 456–462. <https://doi.org/10.31004/edukatif.V3i2.324>
- Ridwan, A. (N.D.). Program Magister Ilmu Administrasi Publik Kekhususan Kebijakan Publik. 234.
- Sakti, L. P., Sulistyaningsih, T., & Sulistyowati, T. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Malang. 6, 15.
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Anak. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4, 1–11.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating The Impact Of Covid-19 On Poverty In Indonesia*. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Van Barneveld, K., Quinlan, M., Kriesler, P., Junor, A., Baum, F., Chowdhury, A., ... Rainnie, A. (2020). The Covid-19 Pandemic: Lessons On Building More Equal And Sustainable Societies. *Economic And Labour Relations Review*, 31(2), 133–157. <https://doi.org/10.1177/1035304620927107>

Article submitted 27 Dec 2021. Resubmitted 18 July 2022. Final acceptance 3 August 2022. Final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 7, No. 2, 2022